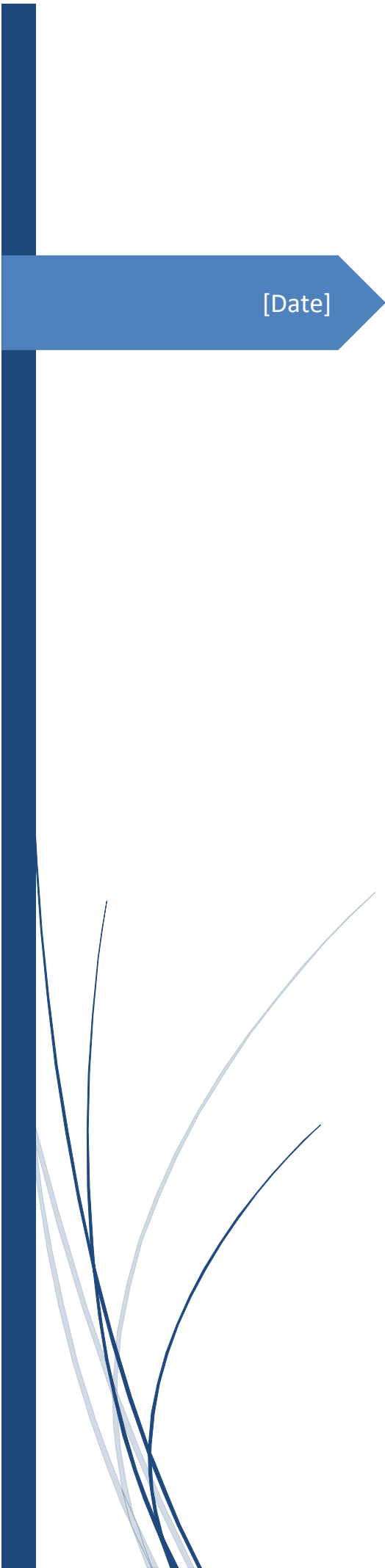


[Date]

# LAKIP

DINAS SOSIAL KOTA BOGOR





## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Sosial Kota Bogor telah dapat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan Dinas Sosial Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Secara keseluruhan Dinas Sosial Kota Bogor telah mampu melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai. Keberhasilan Dinas diukur dengan membandingkan antara rencana target sasaran strategi yang ingin dicapai dengan realisasi pencapaiannya sesuai dengan indikator-indikator di dalam sasaran strategis yang ada, dan didukung juga dengan program dan kegiatan selama tahun 2021. Capaian kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target tersebut.

Namun di dalam pelaksanaan kegiatan, masih perlu adanya pembenahan baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaannya. Sehingga hal-hal yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan penjelasan tentang kinerja Dinas Sosial Kota Bogor selama Tahun 2021, sehingga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan selanjutnya.

Bogor,        Desember 2021  
Kepala Dinas Sosial Kota Bogor

**FAHRUDIN, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 196307191988111001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum**

Dinas Sosial Kota Bogor adalah salah satu perangkat dari Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai tugas membantu Walikota Bogor yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Kepala Wilayah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota. Perubahan ini kemudian berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan - kewenangan tersebut. Bahkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa Daerah berwenang menetapkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Bogor membentuk Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.

Dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 104 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial bahwa Dinas Sosial adalah Aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan



tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor. Wilayah kerja Dinas Sosial Kota Bogor meliputi 6 Kecamatan 68 Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, Dinas Sosial Kota Bogor berpedoman pada Program Kerja Tahunan dan selama tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan baik yang ditunjang APBD/ APBN maupun kegiatan swadana dan pembangunan dengan anggaran dana yang ada.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan Organisasi**

### **1. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 104 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial sebagai unit pelaksana teknis dan unsur penunjang di bidang Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor. Dinas Sosial Kota Bogor berkedudukan di Jalan Merdeka No. 142 Bogor.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Sosial Kota Bogor mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Dinas Sosial Kota Bogor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial;



d. Pelaksanaan teknis operasional di bidang sosial.

### **3. Kewenangan Dinas Sosial Kota Bogor**

Dinas Sosial Kota Bogor mempunyai kewenangan untuk menangani urusan Pemerintah Daerah di Sosial. Dinas Sosial adalah Aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor. Wilayah kerja Dinas Sosial Kota Bogor meliputi 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan.

### **4. Susunan Organisasi**

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 104 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh :

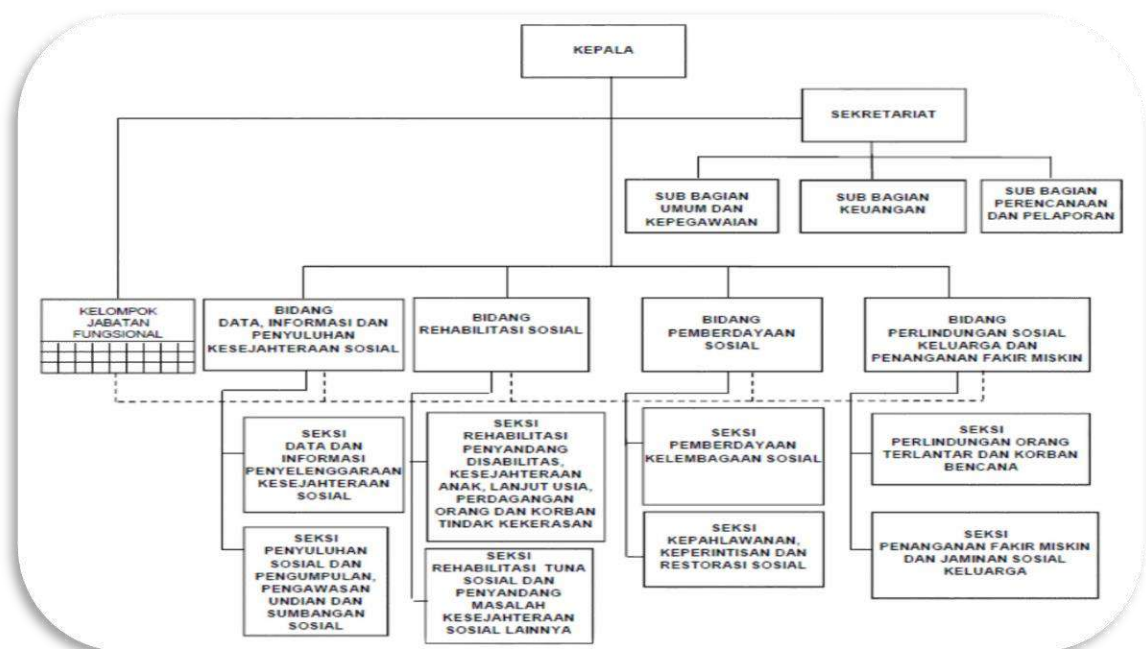
- a. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  
- b. Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial membawahkan:
  1. Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  2. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial.
  
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial dasar di Luar Panti Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia, Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;



2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya di Luar Panti.

- d. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:
  - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Undian Gratis Berhadiah dan Sumbangan Sosial;
  - 2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahkan:
  - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Anak terlantar;
  - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Tenaga Kerja Pelaksana;

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bogor sebagai berikut :





### **1.3 Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bogor mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah



7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 104 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial.

#### **1.4 Reviu Berkala**

Reviu berkala dilakukan dengan tujuan untuk mensinkronkan dengan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, Sasaran, indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 - 2024, selain itu agar dapat memperbaiki guna penyempurnaan lebih lanjut.

Hasil dari reviu diharapkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bogor serta tersedianya dokumen perencanaan yang lebih akuntabel.

#### **1.5 Isu - isu Strategis**

Tujuan dan Sasaran isu-isu Strategis itu antara lain :

- meningkatkan Kesejahteraan PMKS ( Anak terlantar, Anjal, Gepeng, WTS, Eks pengguna Narkoba,Psikotropika, dan minuman keras, eks narapidana dan penyakit sosial lainnya.
- Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial PMKS ( Lansia, disabilitas dan korban tindakan kekerasan )
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas
- Meningkatkan upaya penanggulangan Kemiskinan



Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang sehingga harus diantisipasi. Isu strategis bagi Dinas Sosial Kota Bogor diperoleh menggunakan metode analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal berupa identifikasi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dapat dikendalikan secara langsung. Analisis eksternal berupa identifikasi kondisi yang dapat menciptakan peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang berada di luar kendali organisasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

### **Analisis Internal**

1. Kekuatan (*Strength*)
  - a. Memiliki konsistensi terhadap komitmen peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik.
  - c. Memiliki semangat melayani *stakeholder*.
  - d. Memiliki Loka Bina Karya dan Rumah Singgah.
  - e. Memiliki kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Tagana, PSM, TKSK, Karang Taruna, Pendamping PKH, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Pekerja Sosial, WKSBM).
2. Kelemahan (*Weakness*)
  - a. Pelaksanaan program yang belum optimal.
  - b. Efektivitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik.



- c. Masih kurangnya tenaga fungsional yang kompeten di bidangnya (pekerja sosial, penyuluh sosial).
- d. Terbatasnya jumlah personil Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas fungsi.
- e. Terbatasnya sarana prasarana.
- f. Pelayanan kepada masyarakat dan khususnya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum optimal.
- g. Masih perlu ditingkatkan koordinasi yang baik dengan pihak terkait.
- h. Belum adanya Pusat Kesejahteraan Sosial.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, sesuai dengan yang tercantum dalam Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2020 - 2024, maka Dinas Sosial Kota Bogor mempunyai Visi dan Misi yang akan mendukung tercapainya target tersebut. Adapun Visi dan misinya adalah sebagai berikut :

#### **A. Visi dan Misi**

##### **Visi**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Maka visi



Dinas Sosial Kota Bogor adalah mengacu pada visi Kota Bogor yaitu :

***“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”***

### **Misi**

Misi adalah penjabaran dari visi organisasi yang dituangkan dalam pernyataan (*statement*) organisasi yang terfokus kepada kebutuhan stakeholdernya. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial Kota Bogor mempunyai misi yang mengacu pada misi Kota Bogor sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat***
- 2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas ;***
- 3. Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera .***

## **2.2 Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

### **Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi.

Sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Sosial Kota Bogor yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka **tujuan** Dinas Sosial Kota Bogor adalah :

- 1. Meningkatkan kesejahteraan PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Na rkoba,***



***Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)***

- 2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)***
- 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas***
- 4. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan***

**Adapun** indikator kinerja tujuan dari masing – masing tujuan yaitu :

- 1. Persentase PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya) yang berhasil berfungsi secara social;***
- 2. Persentase PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan) berhasil berfungsi secara social***
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas***
- 4. Persentase keluarga miskin yang tergraduasi***

### **Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran Dinas Sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)
2. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas
4. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan
5. Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social

**Indikator Kinerja Sasaran :**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka Dinas Sosial Kota Bogor menetapkan Indikator kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

**Sasaran 1 :**

1. Persentase PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya) yang tertangani

**Sasaran 2 :**

1. Persentase PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan) yang tertangani

**Sasaran 3 :**

1. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas
2. Persentase hasil temuan pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti
3. Nilai AKIP Dinas Sosial

**Sasaran 4 :**

1. Persentase keluarga miskin yang tergraduasi



2. Persentase tingkat Akurasi data PSKS/PMKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3. Tingkat Akurasi DTKS

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
A. Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya) yang berhasil berfungsi secara social	9,5%	9,6 %	9,7 %	9,8%	9,9%
• Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya) yang tertangani	9,5%	9,6 %	9,7 %	9,8%	9,9%



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
B. Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)	Persentase PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan) berhasil berfungsi secara social					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasaran: Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)</li> <li>Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan</li> </ul>	<p>Persentase PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan) yang tertangani</p> <p>Persentase PSKS yang Aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p>	24,9 %	24,6 %	24,7 %	24,8%	86,00 %
C. Tujuan 3: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasaran: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas</li> </ul>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja Dinas</p> <p>Persentase hasil temuan pemeriksaan</p>	BB	BB	A	A	A
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %





Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
	BPK, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti					
D. Tujuan 4: Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang tergraduasi					
• Sasaran 1: Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang tergraduasi	0,60 %	1,10 %	1,60 %	2,10 %	2,60 %
• Sasaran 2: Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	27,85 %	32,22 %	36,60 %	40,98 %	45,36 %

### C. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan Dinas Sosial Kota Bogor dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial adalah :

#### **Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020 – 2024**

<b>Visi</b>	<b>: Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga</b>
-------------	---



<b>Misi</b>	<b>: Mewujudkan Kota Cerdas</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kesejahteraan PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	Peningkatan Pelayanan Terhadap PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	Meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial serta bimbingan lanjut untuk dapat kembali melaksanakan fungsi sosial nya di dalam masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)	Peningkatan Pelayanan Terhadap PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)	Meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial serta bimbingan lanjut untuk dapat kembali melaksanakan fungsi sosial nya di dalam masyarakat
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas		
<b>Misi</b>	<b>: Mewujudkan Kota Sejahtera</b>		
Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi	Meningkatkan Pelayanan Terhadap fakir miskin yang



		Fakir Miskin	memperoleh perlindungan dan jaminan social
	Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan PSKS	Meningkatkan kualitas data PMKS dan Sumber Daya Manusia atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Meningkatkan pemberdayaan PSKS

#### **D. Program dan Indikator Kinerja Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Tahun 2021 Dinas Sosial kota Bogor mendapatkan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Dinas Sosial Kota Bogor sebesar Rp. **8.209.711.805,-** dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. **7.284.633.752** ,- yaitu untuk mendukung 6 program, 15 Kegiatan dan 29 sub kegiatan. Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. **Program** Penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **indikator kinerja program** : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bogor. Program ini didukung dengan **kegiatan** Administrasi Umum Perangkat daerah pada:



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Program** Penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **indikator kinerja program** : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bogor. Program ini didukung dengan **kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Program** Penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **indikator kinerja program** : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bogor. Program ini didukung dengan **kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



**Program** Penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **indikator kinerja program** : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bogor. Program ini didukung dengan **kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** sebagai berikut :

d. Pengadaan Mebel

**Program** Pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja keuangan, dengan **indikator kinerja program** :

- a. Nilai AKIP Perangkat Daerah;
- b. Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti.

Program ini didukung dengan **kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, dengan indikator kinerja program:

- a. Prosentase jumlah fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang direhab dan berdaya;
- b. Prosentase jumlah Anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya;
- c. Prosentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik.

Program ini didukung dengan **kegiatan-kegiatan** sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota; dengan Sub Kegiatan



- \* Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
  
- b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan;
  - \* Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - \* Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - \* Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
  
- 3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA dengan **indikator kinerja program** : Prosentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik. Program ini didukung dengan **kegiatan-kegiatan** sebagai berikut :
  - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
    - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
  - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
    - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
  
- 4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
  - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub Kegiatan sebagai berikut :
    - \* Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial



\* Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sub Kegiatan sebagai berikut :

\* Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

\*Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, dengan **indikator kinerja program** : Jumlah Anak Terlantar yang dibina. Program ini didukung dengan

a.Kegiatan **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**;

-Sub Kegiatan Rujukan /Penjangkauan Anak-Anak Terlantar;

b.Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

-Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

-Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

-Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

6. **Program** PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN, dengan **indikator kinerja program** :

a. Jumlah makam pahlawan yang terpelihara / terawat; Program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

i. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan

-Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;



-Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

Program ini didukung dengan **kegiatan** berikut :

- a. Penyediaan Informasi Publik sesuai Undang - Undang KIP.

TABEL 1.1

No	Program	Kegiatan	Indikator Program	Target	Sub Kegiatan 2021	Anggaran
				2021		
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.120.200
			Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.990.000
				100	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.280.000
				100	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.769.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	80	5 Pengadaan Mebel	89.710.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.090.000
				100	7 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.712.600





				100	8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.211.552
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	80	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 000.000
				80	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	301.398.200
				80	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.920.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB	12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.436.000
			Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Per Urusan	80			
			Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90			



							44.441.600
II	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak Anak Terlantar	Prosentase Penurunan Anak Terlantar	19,48	13	Rujukan/Penjangkauan Anak Anak Terlantar	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penurunan Anak Terlantar	21,41	14	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	518.384.400
			Persentase KK Miskin	5,78%	16	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	29.276.400
			Terbinanya pendamping sosial PKH	5,78%	15	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.857.017.800
III	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi		17	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	252.776.600
			Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi		18	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	84.720.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	29.58	19	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	76.318.000



			Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi		20	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	18.000.000
IV	Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/Kota	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	100	21	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	37.614.400
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	27,85	22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	134.724.000
				100	23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	328.808.400
			Persentase keluarga miskin yang tergraduasi	5,78%	24	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	13627800
V	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial	100%	25	Penyediaan Makanan	356.092.400
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			26	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	144.520.000



VI	Program Pengelolaan taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Lokasi Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100	27	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.300.000.000
				100	28	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	67.673.900

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah **Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV.**

Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Dinas Sosial Kota Bogor oleh Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretaris dan Kepala Bidang oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bogor.

Perjanjian Kinerja Eselon IV yaitu dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Bidang dan Kepala Seksi oleh Kepala Bidang.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS SOSIAL KOTA BOGOR  
TABEL**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya) yang tertangani	9,5%
2	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)	Persentase PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan) yang tertangani	24,5%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas	BB
		Persentase hasil temuan pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang tergraduasi	0,60%
5	Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	27,85%



TABEL PROGRAM :

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 2.020.638.052	APBD Kota Bogor
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 514.774.600	APBD Kota Bogor
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 431.814.600	APBD Kota Bogor
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 2.440.120.200	APBD Kota Bogor
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 500.612.400	APBD Kota Bogor
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 1.367.673.900	APBD Kota Bogor
	J u m l a h		
		<b>Rp. 7.284.633.752</b>	



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS SOSIAL KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2021**

**3.1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi
			2021	2021
1	<b>Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)</b>	Persentase PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya) yang tertangani	9,5%	18,8%
2	<b>Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)</b>	Persentase PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan) yang tertangani	24,5%	10,44,%
3	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas</b>	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas	BB	BB



		Persentase hasil temuan pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti	100%	100%
4	<b>Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan</b>	Persentase keluarga miskin yang tergraduasi	0,60%	0,11%
5	<b>Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	27,85%	77,05%

Realisasi pada akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang ditargetkan rata-rata pencapaian 70%.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2021 Dinas Sosial Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 1

**Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Realisasi Capaian	Target	Perkiraan Capaian
			2020			2021	





1	<b>Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)</b>	Persentase PMKS (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya) yang tertangani	9,5%	18,8%	197,8%	9,6%	19%
2	<b>Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)</b>	Persentase PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan) yang tertangani	24,5%	10,4%	42,6%	24,6%	12%
3	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas</b>	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase hasil temuan pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
4	<b>Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan</b>	Persentase keluarga miskin yang tergraduasi	0,60%	0,11%	18,3%	1,1%	0,1%



5	<b>Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	27,85%	77,05 %	276,4%	32,22%	80%
---	---	---	--------	---------	--------	--------	-----

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dari pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2021 rata-rata pencapaian kinerja sebesar 82.87% dengan realisasi anggaran (belanja langsung) sebesar Rp. 7.284.633.752,- atau 50,61 % dan Belanja tidak langsung Rp. 8.209.711.805,- atau 95,53% seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2

#### Evaluasi Capaian Keuangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi		Sub Kegiatan	Anggaran 2021			
				2021	2021	% Realisasi s/d Desember 2021		Pagu Anggaran Kegiatan dalam APBD	Realisasi Anggaran s/d Desember 2021	% Realisasi Anggaran s/d Desember 2021	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100%	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.120.200	16.329.000	95,38
							2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.990.000	181.600.000	69,05



							3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.280.000	32.880.200	93,20
							4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.769.000	226.481.169	77,62
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	80	100%	5	Pengadaan Mebel	89.710.500	84.658.700	94,37
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80	80	100%	6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.090.000	141.755.438	78,28
				80	80	100%	7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.712.600	70.906.600	93,65
							8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.211.552	528.583.976	97,49
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	80	100%	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	14.978.300	71,33
							10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	301.398.200	292.585.288	97,08
							11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.920.000	142.824.957	91,60



	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.436.000	46.000.000	99,06
			Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Per Urusan	80	80	100%		Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah / Bansos)		-	-
			Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	90	100%					
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif	100	100	100%	13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	37.614.400	35.088.400	93,28
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					14	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	134.724.000	102.613.800	76,17
							15	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	328.808.400	304.370.800	92,57



							16	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	13.627.800	10782800	79,12
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Prosentase Penurunan Anak Terlantar	19,48	15,84	81,31%	17	Rujukan /Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	44.441.600	42.643.600	95,95
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah PMKS yang tertangani	100	100	100%	18	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	518.384.400	505.148.920	97,45
			Prosentase KK Miskin	100	100	100%	19	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.857.017.800	114.934.600	6,19
							20	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	29.276.400	29.276400	100
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Penurunan Anak Terlantar  Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	21,41	100	100%	21	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	252.776.600	206.412.600	81,66
							22	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluargah	84.720.000	82.812.000	97,75
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	29.58	100	100%	23	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	18.000.000	16.950.000	94,17



		raan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									
			Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina	100	100	100%	24	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	76.318.000	74.584.000	'97,73
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan Penyediaan Natura/Makanan	100	100	100%	25	Penyediaan Makanan	356.092.400	296.291.900	83,21
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	100	100	100%	26	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	144.520.000	136.320.000	94,33
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100	100	100%	27	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1.300.000.000	1.196.240.230	92,02
				100	100	100%	28	Penanaman Nilai-nilai Keperintisan dan Restorasi Sosial	67.673.900	62.948.500	93,02



## **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **1) Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, meliputi fasilitasi dan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Sosial Kota Bogor pada Sub Kegiatan sebagai berikut

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ini sebesar Rp. 17.120.200,- dengan realisasi 95,38%.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor ini sebesar Rp. 262.990.000,- dengan realisasi 69,05%.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ini sebesar Rp. 35.280.000,- dengan realisasi 93,20%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini sebesar Rp. 291.769,000,- dengan realisasi 77,62%.

### **2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, meliputi :

Pengadaan Mebel

- Pengadaan Meja Rapat Pejabat 1 Paket
- Lain-Lain Lemari dan Arsip Pejabat/Lemari Display 1 Unit
- Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 103 buah



Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 89.710.500 dengan realisasi 94,37%

**3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, meliputi :

- Pemeliharaan printer
- Pemeliharaan Computer
- Pemeliharaan Ac
- Pemeliharaan Videotron

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 301.398.200 dengan realisasi 97,08 %

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 155.920.000 dengan realisasi 91,60%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 21.000.000 dengan realisasi 71,33%,

**4) Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

**1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD**

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota





- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- c. Standar Pelayanan Minimal
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
- e. Risk Management dan Tindak Pengendalian Tahun 2021
- f. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2021
- g. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2021

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 46.436.000 dengan realisasi 99,06%

## **2) Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah / Bansos)**

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai anggaran dari kegiatan Program Kegiatan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2021.

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 1) Penyediaan Informasi Publik sesuai Undang Undang KIP

Kegiatan ini dilaksanakan dikarenakan anggaran dari kegiatan ini sesuai pagu anggaran program kegiatan pada Dinas sosial Kota Bogor . Tetapi capaian kinerja opada kegiatan ini mencapai 100% , dikarenakan setiap laporan di dalam Aplikasi Sibadra kami tanggapi dan laksanakan penyelesaiannya.

## **II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

### **1) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota , pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**

Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat PARSOSMAS adalah Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Sosial masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan Evaluasi yang berkelanjutan. Berupa kegiatan Bimbingan Teknis Karang Taruna, pembinaan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pembiaian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi Relawan PARSOSMAS dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadikan Parsosmas sebagai pilar-pilar sosial. Diantaranya pembinaan Karang Taruna, menjadi wadah pengembangan generasi muda dan pemberdayaan kepada organisasi sosial sebagai salah satu pilar – pilar sosial pembangunan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan kapasitas Karang Taruna dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Akan tetapi kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya edaran Wali Kota Bogor bahwa tidak boelh menyalanggaran kegaitan yang menimbulkan kerumunna , sehingga dalam kegiatatan ini hanya pemberian BOP kepada 37 Karang taruna Kota Bogor sebesar Rp. 200.000/ 3 (tiga) bulan. Anggaran dari



kegiatan ini sebesar Rp134.724.000 realisasi 78,17% .  
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber  
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat  
Kewenangan Kabupaten/Kota diantaranya memberikan  
Hibah untuk Lembaga/ Organisasi Sosial Masyarakat,

**2) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber  
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota , pada  
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi  
Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan  
Kabupaten/Kota**

Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sosial dan  
Sumbangan Sosial dilaksanakan melalui Kegiatan  
penyuluhan partisipasi sosial di ~~sekolah-sekolah~~  
Lembaga Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha kegiatan  
sosialisasi Perizinan dan Pemantauan undian gratis  
berhadiah dan pengumpulan uang atau barang,  
diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa  
pengumpulan Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang  
atau Barang itu harus berizin. Penyelenggara undian,  
Agen dan masyarakat diminta lebih berhati - hati dalam  
menerima informasi terkait undian (perizinan, promosi ,  
penyegelan, pengundian, pelaporan, evaluasi). Di tahun  
2021 ini kegiatan tersebut, kegiatan ini melibatkan 20  
Penyelenggara UGB dan PUB. Anggaran dari kegiatan ini  
sebesar Rp. Rp. 37.614.400,- realisasi 93,28%

**3) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber  
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota , pada  
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi  
Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan  
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Pusat**

Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dibentuk untuk mengatasi banyaknya keluhan Masyarakat terkait pelayanan Sosial, masih bersifat sektoral, membutuhkan waktu cukup lama dan Sistem koordinasi antar lembaga yang masih lemah. PUSKESOS-SLRT sangat penting dalam meningkatkan Pelayanan Sosial.

Penumbuhan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSESOS) Kota Bogor baru pada tahap Pembentukan Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) tingkat Kota Bogor di Dinas Sosial, dengan direhab dan diberikan ruang SLRT. Sekretariat PUSKESOS yang dibentuk baru 2 (dua) Kelurahan. Belanja Kegiatan yang telah dilaksanakan pembuatan Leaflet/ Brosur senilai Rp. 328.808.400,- realisasi 92,57%

#### **4) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota , pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)**

Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dibentuk untuk mengatasi banyaknya keluhan Masyarakat terkait pelayanan Sosial, masih bersifat sektoral, membutuhkan waktu cukup lama dan Sistem koordinasi antar lembaga yang masih lemah. PUSKESOS-SLRT sangat penting dalam meningkatkan Pelayanan Sosial.

Penumbuhan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSESOS) Kota Bogor baru pada tahap Pembentukan Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) tingkat Kota Bogor di Dinas Sosial, dengan direhab dan diberikan

ruang SLRT. Sekretariat PUSKESOS yang dibentuk baru 2 (dua) Kelurahan. Belanja Kegiatan yang telah dilaksanakan pembuatan Leaflet/ Brosur senilai Rp.13.627.800,- realisasi 79,12%.

### **III) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

#### **1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Kegiatan ini bertujuan mengatasi, memperbaiki dan merubah permasalahan sosial yang menimpa individu atau golongan sehingga dapat individu atau golongan tersebut dapat hidup wajar di tengah masyarakat. Usaha - usaha yang dilakukan dalam penanganan PMKS adalah dengan melakukan pembinaan berupa bimbingan sosial, pemberian motivasi, pemberian keterampilan melalui pelatihan, pembinaan di Panti Rehabilitasi Sosial, dan juga melalui sosialisasi dalam rangka pemulihan sikap dan perilaku dari Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dan Wanita Tuna Susila (WTS). Kegiatan pembinaan terhadap Anjal, Gepeng dan WTS yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **Anak Jalanan (Anjal)**

Dari hasil penjangkauan yang dilaksanakan terdapat 45 Anak Jalanan (Anjal) yang berhasil dibina. Kegiatan penjangkauan Anak Jalanan dijadwalkan sebanyak 8 ( delapan ) kali dalam sebulan dalam rangka menurunkan jumlah PMKS yang ada di Kota Bogor, adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak jalanan tersebut adalah sebagai berikut :



1. melakukan identifikasi data, memberikan pengarahan dan motivasi;
2. mengirimkan anak jalanan tersebut ke Panti Rehabilitasi Sosial (a.1 Panti Rehabsos Pangudi Luhur);
3. pemenuhan gizi anak jalaan melalui pemberian snack box kepada anak jalanan terutama di daerah rawan anak jalanan;
4. penjangkauan anak jalanan dengan cara pendekatan langsung kepada anak jalanan di daerah rawan anak jalanan dengan memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan supaya anak jalanan kembali ke lingkungan sosial (rumah dan bersekolah).

### **Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)**

Dari penjaringan yang dilaksanakan terdapat 86 Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) yang berhasil dijaring dan dilaksanakan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan terhadap Gepeng tersebut adalah :

1. melaksanakan identifikasi, pengarahan dan motivasi di lingkungan rumah singgah Dinas Sosial;
2. mengirim Gepeng tesebut ke Panti Rehabilitasi Sosial (a.1 Panti Rehabsos Pangudi Luhur);
3. mengembalikan Gepeng tersebut ke tempat asalnya masing – masing.

### **Wanita Tuna Susila (WTS)**

Dari penjaringan yang dilaksanakan terdapat 4 Wanita Tuna Susila (WTS) yang berhasil dijaring.



Pembinaan yang dilaksanakan terhadap Wanita Tuna Susila (WTS) tersebut adalah :

1. melaksanakan identifikasi, pengarahan dan motivasi;
2. memfasilitasi WTS tersebut ke Rumah Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (RRSKW) Cibadak Sukabumi.

Adapun jenis – jenis pembinaan yang dilakukan adalah :

1. Pembinaan mental dan rohani melalui pendekatan keagamaan;
  2. Pemeriksaan Kesehatan
  3. Pendidikan kedisiplinan;
  4. Pemberian keterampilan sesuai minat dan keahlian yang dimiliki dan diinginkan;
  5. Pemberian bantuan alat keterampilan;
- Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 81.743.800 realisasi sebesar 89,94%

## **2) Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penanganan dan perawatan Anak Jalanan , Orang Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar ataupun dirujuk oleh RS. Marzuki Mahdi. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan PMKS. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 18.000.000 realisasi sebesar 94,17%.



### **3) Pembinaan bagi Wanita Tuna Susila, Kelompok Minoritas dan Eks Narapidana**

Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan anggaran dari kegiatan ini mengalami refocusing akibat dari pandemic Covid 19

#### **h) Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**

##### **1) Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran terbatas sesuai kebijakan refocusing akibat dari pandemic Covid 19. Adapun sampai tahun ini sebanyak 90 yayasan/panti/orsos yang sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALAKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia .

#### **i) Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma**

##### **1) Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Disabilitas**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan sosial kepada 360 orang disabilitas terlantar dan tidak terlantar, melalui Sosialisasi dan edukasi kemandirian bagi disabilitas, juga memfasilitasi pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian sosial . Sedangkan pembekalan atau bimbingan dasar bagi Disabilitas yang dibina dan pendamping bagi Disabilitas melalui kegiatan kegiatan **Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Disabilitas** dalam melaksanakan aktivitas dan fungsi sosialnya. Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 252.776.600 dengan realisasi 81,66%





## **2) Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran terbatas sesuai kebijakan refocusing akibat dari pandemic Covid 19., tetapi berdasarkan tupoksi kami melaksanakan dengan kasus yang dilaporkan sebanyak 16 anak korban kekerasan rumah tangga dan 17 anak korban kekerasan seksual, Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 84.720.000 dengan realisasi 97,75%

### **j) Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya**

#### **1) Penyelenggaraan Perlindungan Sosial**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan adanya orang terlantar dalam perjalanan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial ke tempat asal sebanyak 130 orang dengan anggaran sebesar Rp. 518.384.400 dan realisasi sebesar 97,45% .

#### **2) Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Operator dan Pendamping serta Supervisor SDM PKH sehingga dapat terselenggara penyaluran Program Keluarga Harapan dan bantuan Pangan Non Tunai yang tepat sasaran , tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Terlaksananya Rakor Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Kota (tidak dilaksanakan)



Terlaksananya Pembinaan kepada 70 orang Operator dan Pendamping Program Keluarga Harapan orang, dengan anggaran sebesar Rp. 1.857.017.800 dan realisasi sebesar 6,19% .

IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, dengan indikator kinerja program : Jumlah Anak Terlantar yang dibina. Program ini didukung dengan

a.Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;

-Sub Kegiatan Rujukan /Penjangkauan Anak-Anak Terlantar;

b.Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

-Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

-Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

-Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 42.643.600 dengan realisasi 95,95%

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, dengan indikator kinerja program : Jumlah Anak Terlantar yang dibina. Program ini didukung dengan

a.Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;

-Sub Kegiatan Rujukan /Penjangkauan Anak-Anak Terlantar;



- b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial
- c. Kesejahteraan Keluarga;
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

**Tabel**

**Jumlah KPM yang terbantu dari Tahap I s/d**

**Tahap IV Tahun 2021**

<b>Tahap</b>	<b>Jumlah RTSM/KPM</b>	<b>Jadwal Pencairan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah Anggaran Rp.</b>
I	20.203	Januari	6 Kec.	15,188,425,000
II	20.465	Maret	6 Kec.	6,031,426,000
III	29.944	Juli	6 Kec.	6,936,667,000
IV	30.466	Oktober	6 Kec.	21,975,525,000

Penanganan Program Keluarga Harapan didanai oleh APBN yang disalurkan langsung dari Kementerian Sosial RI melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk Kota Bogor melalui Bank BNI ke rekening masing – masing RTSM/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Agar bantuan yang diterima sampai kepada KPM dan tepat penggunaannya diperlukan pendataan (Verifikasi dan validasi) yang dilakukan oleh pendamping PKH dengan teknik mapping by name, by address and by problem, kemudian saat pencarian dana PKH diperlukan

pendampingan yang intensif serta berkelanjutan. Kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan PKH sangat diperlukan untuk menyamakan dan memperkokoh sinergitas PKH.

#### **b. Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar**

Kegiatan ini harusnya dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan bagi masyarakat kategori Lanjut Usia melalui Program Pemberdayaan Lanjut Usia / Pelatihan lanjut Usia dalam Program Pelatihan Keterampilan Tata Boga yang sudah terverifikasi dan tervalidasi sebelumnya sebanyak 50 orang lansia produktif, bantuan sembako diberikan bagi 300 orang lansia non potensial di Kota Bogor dalam rangka HUT Lanjut Usia. Namun kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan anggaran refocusing Pandemi Covid 19 . Adapun kegiatan lain yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bogor adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi keluarga dan lingkungan sekitar lansia agar tidak mentelantarkan para lansia sehingga tercipta paradigma bahwa lansia masih berdaya guna dan memiliki peran serta dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan lainnya adalah terpenuhinya kebutuhan lanjut usia terlantar kepada 55 orang lanjut usia .

Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 26.182.400 dengan realisasi 96,94 %.

#### **c. Penyelenggaraan Program Sembako**

Kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang disebut Program SEMBAKO yang sebelumnya Program Beras Sejahtera ( Rastra ) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk



membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur. Penerima manfaat mendapat bantuan sebesar Rp. 200.000,-/KPM per Bulan yang sudah disalurkan selama 10 bulan (Tahun 2021) sesuai ketentuan bantuan tidak bisa diambil tunai tetapi diberikan barang berupa sembako yaitu : karbohidrat (beras), sumber protein hewani (telur, ayam, daging dan ikan segar), nabati (kacang-kacangan,tahu, Tempe), vitamin dan mineral (buah dan sayur). Adapun kegiatan yang dilaksanakan :

1. Rapat Evaluasi E warong Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) /program SEMBAKO Tingkat Kota Bogor.
2. Rapat Tim Koordinasi Bansos Pangan tidak dilaksanakan Karena Revokusing Anggaran Tahun 2021.
3. Terlaksananya Monitoring Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program SEMBAKO ke 68 Kelurahan

Penyaluran Program SEMBAKO dapat dilihat dari table berikut ini :

**Tabel**

**Dari Hasil Penyaluran Di Tahun 2021 Dari Januari Sampai Dengan Desember 2021**

No	Kecamatan	Jumlah KPM yang Bertransaksi	Jumlah Anggaran	Catatan
1	Bogor Selatan	108449	21.689.800.000	
2	Bogor Timur	40245	8.049.000.000	
3	Bogor Tengah	40192	8.038.400.000	
4	Bogot Barat	105327	21.065.400.000	



5	Bogor Utara	69566	13.913.200.000
6	Tanah sareal	89460	17.892.000.000
	<b>Total</b>	<b>906.478</b>	<b>181.295.600.000</b>

Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp.**181.295.600.000** realisasi 90, 64%.

**d. Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE) dan Pembinaan KUBE**

Permasalahan yang dihadapi oleh WRSE di Kota Bogor cukup banyak. Pada umumnya mereka berstatus janda karena ditinggal suaminya. Yang menjadi tulang punggung keluarga dan harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Banyak dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan khusus sebagai modal untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upaya yang telah dilakukan antara lain diberikan pembinaan dan pendampingan serta dibantu keterampilan usaha dan diberikan bantuan peralatan dan modal usaha di Tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan penyaluran bansos untuk program SEMBAKO memudahkan KPM dilayani melalui 52 Agen Bank pada awal penyaluran dan selanjutnya melalui 57 E Warong Kube Jasa . Adapun E- Waroeng Kube Jasa/ Agen Penyalur yang telah didirikan sejumlah 109 unit dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel**  
**Data Jumlah E Warong Kube Jasa Untuk Melayani KPM**  
**Penerima Bansos Bpnt Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jml E warong/Agen</b>	<b>BPNT PKH</b>
1	Bogor Barat	24	a. 1 unit E Warong KUBE /Agen Penyalur diharapkan bisa melayani Minimal 300 KPM.
2	Bogor Selatan	27	
3	Bogor Tengah	10	
4	Bogor Timur	15	b. E Warong KUBE Jasa dikelola oleh 10 orang KPM penerima Bansos (PKH dan BPNT).
5	Bogor Utara	12	
6	Tanah sereal	21	
	<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	

E - Warong KUBE (elektronik Warong Gotong Royong KUBE) adalah tempat usaha dan keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh fakir miskin penerima program KUBE, PKH dan BPNT yang pelaksanaannya secara non tunai. Fungsi e-Warong KUBE adalah sebagai tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga, agen bank penyalur bantuan sosial non tunai, sebagai tempat pemasaran hasil produksi KUBE serta sebagai tempat pembayaran telepon, listrik, dan air bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat umum.

**e. Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu / Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**

Kegiatan ini berupa pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun APBD Kota Bogor.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya ketepatan dalam menyampaikan laporan dari beberapa sumber data yang akurat untuk dijadikan pedoman dan masih terjadi pemahaman yang bervariasi dalam pemuktahiran data. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan pihak wilayah sebagai penanggungjawab data di wilayah agar tercapai kesepakatan dalam menyampaikan laporan secara priodik hasil pemutahiran data DTKS. Pada tahun 2021 Verivikasi dan Validasi data hanya dilaksanakan 1 (satu) kali yang seharusnya 2 (dua) kali dalam setahun , ini dikarenakan Pandemi Covid 19.

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor di Tahun 2021, bahwa Jumlah Penduduk Kota Bogor sebanyak 338,386 Kepala Keluarga, sedangkan Jumlah masyarakat Miskin yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebanyak 70.912 Kepala Keluarga yang sah diakui oleh Pemerintah, Artinya Data kemiskinan dikota Bogor hanya mencapai 5.78 % dari Jumlah Kepala Keluarga di Kota Bogor terdapat penurunan angka kemiskinan dikarenakan antara lain seperti :

- Pelaksanaan Verivali dan validasi BDT secara akurat
- Pengisian Data Prelist BDT dan pengimputan Verval BST pada Aplikasi Siks-NG (bagi kepala seksi Kemasyarakatan)
- Pengisian Data Prelist BDT dan pengimputan Verval BST pada Aplikasi Siks-NG (Non PNS) hasil Verifikasi dan Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilaksanakan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia terdapat NIK yang tidak Valid setelah disandingkan dengan Data Kependudukann



Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun hal yang perlu dijelaskan, bahwa terdapat jumlah Data 230.000 Kepala Keluarga adalah Penambahan jumlah Warga yang menerima Bantuan baru yang perlu dibantu secara ekonomi karena terdampak pandemic Covid-19, angka kemiskinan otomatis akan bertambah seiring dengan adanya bencana wabah penyakit menular (covid-19). Berikut adalah jumlah Kepala Keluarga yang terdampak Covid 19 , masuk dalam penerima Non DTKS :

<b>KRITERIA</b>	<b>APBD KOTA BOGOR</b>	<b>APBD PROVINSI (BANGUB)</b>	<b>APBN (KEMENSOS )</b>
Non DTKS	NIHIL	NIHIL	28.866 KK

Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 345.964.500 dengan realisasi 97,68% .

## **V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

### **Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)**

Tagana mempunyai tugas pokok prabencana, pada saat kejadian dan penanggulangan bencana pada pasca bencana. Kegiatan yang dilaksanakan beberapa diantara lain adalah memberikan bantuan natura / logistic untuk tanggap darurat, mendirikan dapur umum dalam bencana dengan skala besar yang terjadi di Kota Bogor di Tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat khususnya korban bencana alam maupun sosial diperlukan sarana prasarana yang memadai dan SDM yang kompeten agar pelayanan bisa optimal, oleh karena di tahun-tahun berikutnya peningkatan sarana prasana sangat dibutuhkan . Sub



Kegiatan Penyediaan Makanan Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 356.092.400 realisasi 83,21 % .

- Tagana mempunyai tugas pokok prabencana, pada saat kejadian dan penanggulangan bencana pada pasca bencana. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 144.520.000 realisasi 94,33 % .

**VI. Program PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN, dengan indikator kinerja program :**

a. Jumlah makam pahlawan yang terpelihara / terawat;

Program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan
- -Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.300.000.000 realisasi 92,02 % . ;
- -Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 67.673.000 realisasi 93,02 %;

Kegiatan pada tahun 2021 adalah pemeliharaan makam sebanyak 1.061 makam serta pemeliharaan tanaman makam sehingga menambah kenyamanan keluarga penziarah di Taman Makam Pahlawan Dreded. Pembangunan tempat peristirahatan dilaksanakan di



tahun ini dikarenakan telah terlaksananya Revitalisasi di taman Makam Pahlawan berupa Pelataran ( TMP ) .

Penanaman Nilai -nilai Keperintisan dan Restorasi Sosial Kegiatan Penanaman Nilai -nilai Keperintisan dan Restorasi Sosial

dilaksanakan pada tahun 2021 telah dilaksanakan Revitalisasi di Taman makam Pahlawan berupa Pelataran Taman Makam Pahlawan (TMP) yang anggaran dari kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

## **2. Program dan Kegiatan yang mengalami rasionalisasi (refocusing) anggaran**

Dalam Pandemi Covid 19 Tahun 2021 , Dinas Sosial mengalami refocusing anggaran terhadap beberapa program, kegiatan dan Sub kegiatan , adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

### **Program / Kegiatan yang terkena rasionalisasi / refocusing akibat adanya pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2021**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



<b>II</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
			2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>III</b>	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
<b>IV</b>	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
<b>V</b>	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan
<b>VI</b>	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian beberapa hal yang dapat kami tuangkan ke dalam Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bogor disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (Evaluasi) kinerja Dinas dengan TUPOKSI dan RENSTRA Dinas Sosial Kota Bogor, yang juga merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Sosial Kota Bogor selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai catatan untuk perbaikan dimasa mendatang, terutama dalam rangka memenuhi administrasi transparan dan akuntabel serta menciptakan dan menjaga kesinambungan yang berkelanjutan (*sustainability*) dari suatu program diharapkan hasil, manfaat dan dampak yang terukur dari setiap kegiatan, maka dipandang perlu adanya perumusan strategis dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu didesain terlebih dahulu uraian / rincian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020 – 2024 ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan sekaligus menentukan indikator kinerja berikut tolok ukurnya yang akan dipergunakan dalam pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kegiatan. Dengan demikian diharapkan akan mempermudah melakukan pengukuran kinerja yang diharapkan.

Namun secara keseluruhan, dengan melihat hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, Dinas Sosial Kota Bogor telah dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum mencapai hasil sesuai dengan target. Hal ini akan dijadikan bahan



masuk untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya sekaligus sebagai sarana introspeksi terhadap kinerja yang telah berhasil dilaksanakan.

Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kota Bogor mendapatkan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai Finalis Top Inovasi Jawa Barat tahun 2021 dengan Judul Inovasi Aplikasi SOLID ( Sosial Integrasi Data ) dalam mencapai target pendataan sesuai dengan data yang telah diverifikasi dan tervalidasi oleh Tim SOLID pada Dinas Sosial Kota Bogor se Jawa Barat, selain itu juga Dinas Sosial mendapatkan Penghargaan Juara II pada acara Lomba Kebersihan antar Perangkat Daerah Se Kota Bogor dari Walikota Bogor. Dalam rangka berpartisipasi mensukseskan program Vaksinasi Pemerintah bagi Disabilitas, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan mengadakan Vaksinasi terhadap Disabilitas yang diinterfensi oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial kota bogor mengadakan Reward Juara Karyawan/karawayati Terbaik dalam meraih Juara Karyawan Berdedikasi Sangat Tinggi Tahun 2021, meraih juara Terinofatif Tahun 2021, dan Karyawan Terdeisiplin terbaik pada karyawan Tahun 2021.



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Sosial Kota Bogor telah dapat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan Dinas Sosial Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Secara keseluruhan Dinas Sosial Kota Bogor telah mampu melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai. Keberhasilan Dinas diukur dengan membandingkan antara rencana target sasaran strategi yang ingin dicapai dengan realisasi pencapaiannya sesuai dengan indikator-indikator di dalam sasaran strategis yang ada, dan didukung juga dengan program dan kegiatan selama tahun 2021. Capaian kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target tersebut.

Namun di dalam pelaksanaan kegiatan, masih perlu adanya pembenahan baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaannya. Sehingga hal-hal yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan penjelasan tentang kinerja Dinas Sosial Kota Bogor selama Tahun 2021, sehingga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan selanjutnya.

Bogor,        Desember 2021  
Kepala Dinas Sosial Kota Bogor

**FAHRUDIN, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 196307191988111001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Gambaran Umum .....	1-2
1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3 Tugas dan Fungsi .....	3-6
1.4 Reviue Berkala .....	6-7
1.5 Isu-Isu Strategis .....	7-8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Kinerja .....	8-9
2.2 Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran .....	10-25
2.3 Perjanjian Kinerja.....	26-28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Pengukuran Kinerja .....	29-30
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	30-32
3.3 Akuntabilitas Keuangan .....	32-58
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59-60</b>